

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Afnil Guza, 2008, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Asa Mandiri, Cet. IV, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Antonius Sujata, 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Austin Ranney, 1990, *The Governing of Men dalam Miriam Budiardjo*, The Dryden Press, Hinsdale, Illinois.
- Bagir Manan, 2006, *Konvensi Ketatanegaraan*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Darwan Prins, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Didik Sukrion, 2009, *Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD 1945*, Media Hukum.
- Eggi Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP.Books, Surabaya.
- Gunawan A Tahuda, 2012, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Jakarta.
- Hanta Yuda, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati*, PT. Gramedia pustaka Utama, Jakarta
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory Of Law and State*, Russell & Russell, New York,
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaharuan Penegak Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, UI-Press, Jakarta
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

- _____, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Milyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Braawijaya, Malang.
- Mahfud, MD, Moh, 2004, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Marjanne Termorshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, Djambatan, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta
- Marpaung Leden, 2001, *Tindak Pidana Korupsi; Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Muchsan, 1991, *Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN*, Makalah Seminar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. 2007. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta
- R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ed.II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raisul Muttaqien, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan I, Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2005, *Membasmi Kanker Korupsi*, Pusat Studi Agama dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, Jakarta.

Sumantri M. “*Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD NRI 1945*” dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.

Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Abdul Kholiq, 2004, “Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. XI Nomor 26. (Mei, 2004)

Adri Fernando Roleh, 2017, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V Nomor 10. (Desember, 2017)

Didik Endro Purwoleksono, 2018, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. II Nomor 1. (Agustus, 2018)

Gunawan A. Tauda, 2011, “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. VI Nomor 2. (November 2011)

I Gusti A.E. Yuliantari, 2015, “Pembentukan KPK sebagai Lembaga Negara Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol. II Nomor 2. (Desember, 2015)

Mamay Komariah, 2016, “Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. IV Nomor 1. (Desember 2016)

Maryanto, 2012, “Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. II Nomor 2. (Juli, 2012)

Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar, 2018, “Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. XVIII Nomor 1. (Desember 2018)

Muhammad Fadli, 2015, “Pentingnya Hak Imunitas Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (*The Importance of Immunity Rights to Corruption Eradication Commission*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. XII Nomor 1 (Desember, 2015)

Ulang Mangun Sosiawan, 2019, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. XIX Nomor 4 (Desember, 2019)

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang "*Kasasi*".

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang "*Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*"

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang "*Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*".

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang "*Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang "*Ketentuan Komisi Yudisial*".

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang "*MPR, DPR, DPD dan DPRD*".

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang "*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*".

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang "*Tindak Pidana Pencucian Uang*".

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang "*Keimigrasian*".

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang "*Komisi Pemberantasan Korupsi*".

TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang "*Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*".

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang "*Peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap*".

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang “*Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang “*Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK*”.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang “*Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK*”.